

# Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Konsep *Blue Economy* Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Sumatera Utara

Shihabuddin Fuady Rangkuti<sup>1\*</sup>, Sukardi<sup>2</sup>, M. Syafii<sup>3</sup>

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara<sup>1,2,3</sup>  
[sfuady.rangkuti@gmail.com](mailto:sfuady.rangkuti@gmail.com), [sukardi.usu@gmail.com](mailto:sukardi.usu@gmail.com), [syafiimuhammad91@gmail.com](mailto:syafiimuhammad91@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 12 Oktober 2023

Disetujui : 22 Oktober 2023

Dipublikasi : 3 Januari 2024

## ABSTRACT

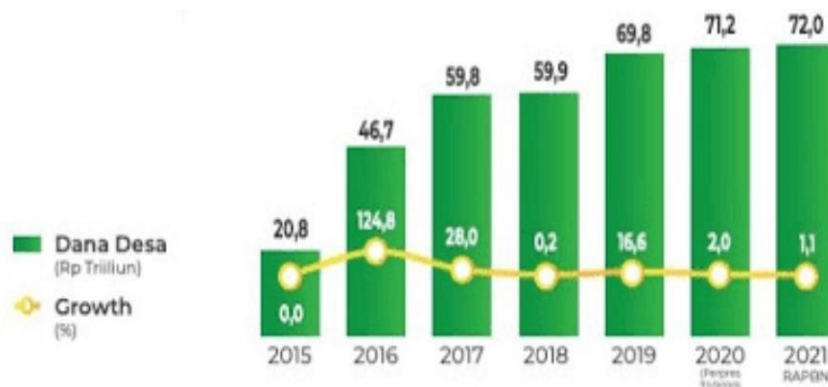
*The Indonesia Sustainable Oceans program is to support Indonesia's change to a blue economy by advancing the financial, social and natural advantages got from sound beach front and sea biological systems. This research aims to carry out a descriptive economic analysis of Village Fund development policies related to the issue of implementing the Blue Economy concept in North Sumatra Province, identifying and evaluating the application of the Blue Economy concept in Langkat Regency and Central Tapanuli Regency, North Sumatra Province, estimating the influence of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index on the level of welfare of village communities in the coastal areas of Langkat Regency and Central Tapanuli Regency, North Sumatra Province. This research uses quantitative and subjective strategies to answer current problems in detail. This research has a Population, namely coastal villages in North Sumatra. With all provisions and considerations, the samples taken were coastal villages in South Tapanuli Regency and Langkat Regency in North Sumatra Province.. The consequences of this study are that the Coronavirus pandemic affects steering approaches for utilizing Town Cash. Where, in 2023, the need utilization of Town Cash is focused on public monetary recuperation, public need projects, and alleviation for dealing with regular and non-cataclysmic events in supporting the accomplishment of the Town SDGs. At present there is no exceptional program that utilizes town cash to foster beach front regions or an extraordinary Blue Economy program in Focal Tapanuli locale and Langkat region. To some degree, the Social Flexibility File (IKS) variable impacts the Local area Government assistance variable, the Financial Versatility Record (IKE) variable affects the Local area Government assistance variable, the Natural Strength File (IKL) variable affects the variable Public government assistance. And that truly intends that in the event that the IKS, IKE, IKL factors progress, the degree of government assistance of the town local area additionally propels.*

**Keywords:** Village Fund, Blue Economy, and The Welfare of The Village Community

## PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban pelaporan Dana Desa.

Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa. Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun berdasarkan data yang disediakan oleh Kemendes PDDT dan aspirasi masyarakat desa. RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.



**Gambar 1. Alokasi Dana Desa Tahun 2015 – 2021**

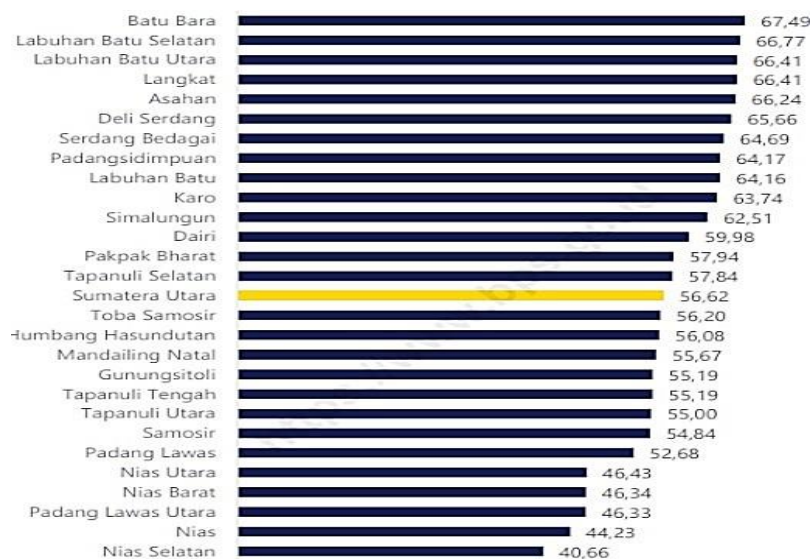
Sumber: Kementerian Keuangan RI

Sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun. Angka ini meningkat Rp 800 miliar atau 1,1% dibandingkan dengan outlook tahun 2020 yang sebesar Rp 71,2 triliun. Tahun 2019 memiliki anggaran desa sebesar 69,8 triliun atau meningkat 16,6 persen dari tahun 2018 yang hanya 59,9 triliun. Tahun 2017 dana desa sebanyak 59,8 triliun yang meningkat sebesar 28 persen dari tahun 2016 yang hanya 46,7 triliun. Dan di tahun 2015 merupakan dana desa terendah selama 7 tahun terakhir yaitu 20,8 triliun. Peningkatan Dana Desa yang begitu besar ini tentunya perlu perencanaan yang matang dalam penggunaan maupun pengalokasiannya dengan tetap berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Sedangkan, Pagu Dana Desa Tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar Rp4 triliun dibandingkan tahun 2021.

Perekonomian masyarakat wilayah pesisir terus mengalami tekanan akibat kemiskinan, ketidakmerataan kesejahteraan, minimnya fasilitas dan adanya kriminalitas. Kondisi lingkungan yang terus mengalami penurunan dapat berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan di wilayah pesisir akibat pencemaran air, sampah, dan bencana menyebabkan penurunan kualitas lingkungan untuk daya dukung kehidupan. Upaya peningkatan kondisi lingkungan dan ekonomi dapat dilakukan secara bersama-sama oleh umat manusia dengan mengubah perilaku kita dalam mengelola dan merespon terhadap kondisi alam. Kemajuan teknologi dapat membantu manusia untuk menyelaraskan pembangunan yang seimbang dengan karakteristik ekosistem lingkungan serta didukung oleh perilaku dalam perencanaan kehidupan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian alam (daulay, 2022).

Pengalihan sasaran pembangunan di wilayah pesisir merupakan salah satu alternatif Pembangunan dimana selama ini hanya bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini dapat mewujudkan tujuan Pembangunan dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kualitas sumberdaya dan lingkungan. Upaya memadukan ketiga kepentingan tersebut diantaranya dapat ditempuh

melalui penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konsep *Blue Economy* (Pauli, 2010).



**Gambar 2. Indeks Pembangunan Desa Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara, 2018**  
Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut gambar di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat pada Kabupaten Batu Bara dengan angka 67,49. Sedangkan kabupaten Langkat berada di posisi ke-empat dengan angka 66,41 sama seperti Kabupaten Labuhan Batu Utara. Rata-rata nilai indeks terendah di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata nilai indeks sebesar 40,66. Pengelolaan sumber daya kelautan di pesisir Sumatera Utara menguji terkait faktor yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi konsep *Blue Economy* dalam mensinergikan kebijakan ekonomi sebagai implementasi SDGs untuk meraih target global Indonesia dan memajukan ekonomi masyarakat pesisir yang diharapkan terintegrasi dengan prinsip pengolahan serta tata kelola lembaga pengelolaan sumber daya yang baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan serta perbaikan sumber daya bagi masyarakat pesisir.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2016 menyampaikan potensi perikanan laut Sumatera Utara sudah mulai mengkhawatirkan, dan telah terjadi ketimpangan potensi sumber daya laut antara perairan Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara. Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara menjadi ujung tombak perikanan tangkap, baik untuk pasar lokal, ekspor, maupun industri perikanan yang berlokasi di Belawan Kota Medan dan Kota Sibolga sebagai pelabuhan perikanan terbesar Sumatera Utara. Pemerintah Sumatera Utara berusaha mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peran pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya adalah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kawasan hutan bakau di pantai timur Provinsi Sumatera Utara juga terus mengalami penyusutan, mirisnya dalam kurun waktu tiga dekade hutan bakau di pantai timur Sumatera Utara mengalami penyusutan hingga 60%. Hutan bakau di kawasan tersebut terus terdegradasi dan hialng karena beralih fungsi menjadi tambak ikan serta udang dan perkebunan kelapa sawit hingga semak belukar lantaran penebangan liar terhadap tumbuhan mangrove untuk dijadikan arang. Mulai dari Aceh Timur sampai ke Deli

Serdang kawasan ini sudah kehilangan mangrove dalam kurun waktu 30 tahun terakhir sebesar 60%. Penebangan liar dengan intensitas yang tinggi terjadi di sekitar Kabupaten Langkat, kawasan ini menjadi daerah di Sumatera Utara yang paling besar menyumbang hilangnya hutan bakau dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Akibatnya dari sisi pendapatan nelayan berkurang lebih dari 40%, sejak 20 tahun terakhir penurunan luas tutupan hutan di pantai timur Sumatera Utara dapat diklasifikasi yaitu perkebunan kelapa sawit berperan sebanyak 45% dalam penurunan status kawasan hutan bakau, lalu tambak sebesar 35%, pertanian sebanyak 25% dan hal lain seperti abrasi, dapur arang, reklamasi tambang pasir itu 5%. Hutan mangrove terluas di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Langkat dengan luas 11.709,16 Ha pada tahun 2010 dan terjadi perubahan luasan hutan mangrove pada seluas 25.816,01 (Restu & Damanik, 2012).

Secara umum potensi keluatan di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat besar. Dengan panjang garis pantai di pesisir Barat Pulau Sumatera ± 200 km memiliki pantai – pantai yang indah, pulau – pulau kecil yang tersebar di Samudera Hindia lebih dari 25 pulau dengan keindahan pantai dan pesona ekosistem bawah lautnya seperti Terumbu Karang dan Ikan Hias di gugus Pulau Mursala dan Pulau Unggas. Kabupaten Tapanuli Tengah juga merupakan salah satu sentra produksi ikan di Kawasan Pantai Barat Sumatera, bahkan sub lapangan usaha/sub-Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini mampu berkontribusi sebesar 46,20% bagi pembentukan struktur perekonomian berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Tapanuli Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2021.

Pada prinsipnya pengaplikasian konsep blue economy di wilayah pesisir akan memberikan poin lebih dan berpengaruh dalam pembangunan nasional, selain itu juga pembangunan kemandirian di wilayah pesisir yang diharapkan terwujud. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2019) menyatakan bahwa Indeks Kesejahteraan SoSial berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat, karena Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi maupun merencanakan suatu program pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan (Bustamam, 2021) yang menyatakan bahwa indeks ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Provinsi Sumatera Utara dinilai saat ini sangat memerlukan penerapan Blue Economy khususnya di wilayah pesisir dengan strategi yang jelas dan terarah sehingga dapat memelihara laut sehat dan memaksimalkan potensi sektor kelautan Indonesia yang sangat melimpah.

## STUDI LITERATUR

### *Blue Economy*

Terminologi *blue economy* merupakan salah satu konsep pembangunan terbaru dengan mengandalkan laut dan perairan yang berlandaskan pada tiga pilar terintegrasi yaitu ekosistem, ekonomi dan sosial. Istilah *blue economy* tersebut telah diangkat dalam berbagai kerja sama internasional, seperti pada pertemuan tingkat *Senior Office Meeting (SOM) for the Asia Pacific Economics Cooperation (APEC)*. Konsep tersebut adalah konsep pengembangan yang membidik tiga kepentingan, yakni pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penyehatan lingkungan (Ilma, 2014).

(Pauli, 2010) mendefinisikan blue economy adalah sebuah model bisnis yang bekerja menciptakan nilai tambah dengan mencuri cara ekosistem alam bekerja. Beberapa cirinya adalah *zero waste*, menggunakan energi terbarukan, menggunakan teknologi yang rendah energi, inovatif dan yang terpenting dalam segi ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja baru. *Blue economy* dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan secara

keseluruhan, sehingga sumber daya laut yang diolah akan dimanfaatkan secara optimal sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional.

### **Kebijakan Dana Desa**

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP yang berjudul Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia) pada tahun 1996 yang kemudian berlanjut setiap tahun. Inti semua laporan ini yang dimulai tahun 1990 adalah pembuatan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) (Todaro, 2011). Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “a process of enlarging people’s choices” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*).

### **Indeks Pembangunan Desa (IPD)**

Indeks pembangunan desa merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa-desa di Indonesia (BPS, 2021). Pengukuran IPD dibangun dari data hasil pendataan Potensi Desa (podes) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada Mei 2018. Melalui komponen penyusunannya, IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup lima dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri. Desa yang mandiri dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera.

### **Indeks Desa Membangun (IDM)**

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta

ramahlingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### Hubungan Antar Variabel

#### 1. Terdapat pengaruh positif Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara

UU No. 11 th 2009 pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara terencana, sistematis dan terarah, dilaksanakan untuk menterjemahkan visi dan misi pembangunan nasional ke dalam kebijakan dan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Setiawan, 2019).

#### 2. Terdapat pengaruh positif Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara

Ketahanan Ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 (BPS,2022) Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

#### 3. Terdapat pengaruh positif Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara.

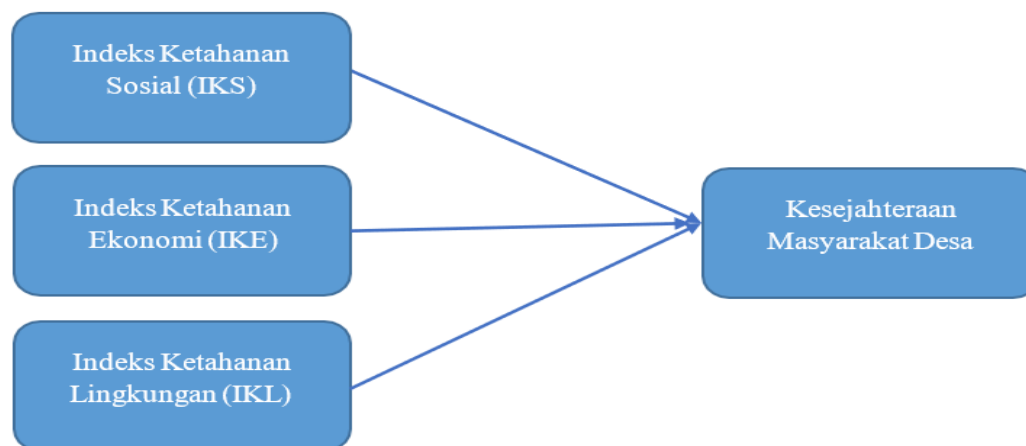
pemanfaatan dana desa dalam menciptakan ketahanan lingkungan adalah program penghijauan, pengelolaan sampah, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya air. Program program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Selain pengelolaan lingkungan, upaya masyarakat untuk dapat meningkatkan ketahanan lingkungan juga akan berdampak pada mitigasi resiko bencana alam yang ada di desa. Dengan dukungan lingkungan yang sehat dan aman, maka masyarakat desa dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hariwibowo, 2023).

#### 4. Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara.

Konsep IDM sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementrian Desa (Permendes) No. 2 Tahun 2016 tentang pola dan peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan

Sosial (IKS). Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa (Sukarno, 2020).

### Kerangka Konseptual



**Gambar 3. Kerangka Konseptual**

### METODE

Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Data yang disajikan adalah panel data yaitu dimana penelitian menggunakan data *cross section*, data yang lebih dari satu dan *time series* data yang dihimpun pada tahun yang berbeda secara bersamaan. Penelitian ini mempunyai Populasi yaitu desa pesisir di Sumatera Utara. Dengan segala ketentuan dan pertimbangan, maka sampel yang diambil adalah desa pesisir di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara. Data yang diteliti adalah Desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 sampai 2022 yang dipublikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui website-website resmi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT RI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) waktu selama 3 tahun (2020 – 2022).

Regresi data panel dapat dilakukan dengan menguji tiga model analisis yaitu *common*, *fixed*, dan *random effect*. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah memilih model yang tepat dari ketiga model yang ada (Baltagi, 2005).

### HASIL

#### Uji Hipotesis

#### Uji T (Parsial)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut ini kriteria untuk pengambilan keputusan dalam penelitian ini:

**Tabel 1. Uji parsial (T)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000339	0.000500	0.678125	0.5037
IKS	0.999720	0.000744	1343.638	0.0000
IKE	0.999713	0.000541	1848.522	0.0000
IKL	1.000047	0.000524	1907.416	0.0000
R-squared	0.999999	Mean dependent var		1.799504
Adjusted R-squared	0.999999	S.D. dependent var		0.208684
S.E. of regression	0.000187	Sum squared resid		9.07E-07
F-statistic	12061702	Durbin-Watson stat		3.164773
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Berdasarkan angka dengan ketentuan = 0,05 dan dk (n-2) atau (10-2) = 8 sehingga diperoleh nilai 2.30600, berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

- IKS (X1) memiliki nilai signifikan sebesar  $0.000 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $1343.638 > 2,30600$ , artinya IKS secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- IKE (X2) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $1848.522 > 2,30600$ , artinya IKE secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
- IKL (X3) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $1907.416 > 2,30600$ , artinya IKL secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

### Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen (IKS, IKE dan IKL) secara simultan terhadap variable dependen (Kesejahteraan Masyarakat)

**Tabel 2. Uji Simultan (F)**

Dependent Variable: PMDN	
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)	
F-statistic	120.61702
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa F tabel = 3,01 dan nilai F hitung sebesar 120.61702. Karena F hitung  $>$  F tabel yaitu  $120.61702 > 3,01$  maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa IKS, IKE dan IKL berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi**

Dependent Variable: PMDN	
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)	
R-squared	0.419997
Adjusted R-squared	0.311247

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Dari tabel diatas besarnya angka *R-Square* ( $R^2$ ) adalah 0.419997. Hal ini menunjukkan bahwa persentase variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 41,99%

atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model yaitu IKS, IKE, dan IKL mampu menjelaskan sebesar 41,99% terhadap variabel dependennya yaitu Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan sisanya 58,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi tersebut.

## PEMBAHASAN

### Perkembangan Kebijakan Dana Desa terhadap issue Blue Economy Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan penggunaan dana desa mengacu pada UU Desa No. 6 Tahun 2014, dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan dana desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menyalurkan dana negara ke desa-desa di Indonesia khususnya untuk pembangunan dan untuk penguatan masyarakat di desa. Dana Desa bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu dana yang dialokasikan ke desa untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang wajib masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana desa menerima dana setiap tahunnya dari pemerintah pusat yang didistribusi ke seluruh kabupaten/kota. Adanya kebijakan penggunaan dana desa ditujukan pada kegiatan-kegiatan di desa yang prioritasnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan ditetapkan dalam Musyawarah Pembangunan Desa (MusrenbangDes) dari rencana kerja tahunan oleh perangkat desa. RKPDes). Terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dana desa tentunya harus digunakan sesuai dengan prinsip swakelola untuk penyerapan tenaga kerja di desa, khususnya bagi masyarakat desa yang miskin (Rahma & Rifkah, 2018). Dana desa yang diterima desa kemudian dikelola oleh pengelola desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala dinas dan bendahara desa yang masing-masing unsur mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Berdasarkan hasil penelitian prioritas penggunaan dana desa provinsi Sumatera Utara saat ini belum memiliki fokus pada pembangunan *blue economy*, fokus penggunaan dana desa saat ini untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemic covid-19 dan program SDG's Desa. Hal ini sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa nasional 2023. Menurut (Daulay, 2022) provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kelautan yang sangat potensial untuk mengembangkan konsep *Blue Economy*. Akan tetapi, dalam pengembangan konsep *blue economy* masih sangat minim dan tidak disosialisasikan secara nyata sehingga banyak pedesaan yang tidak mengetahui bagaimana proses pengembangan konsep *Blue Economy*. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2014) juga menyatakan bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan konsep *Blue Economy*, karena pada kriteria ini merupakan langkah awal untuk menerapkan konsep *Blue Economy*. Diberdayakannya masyarakat adalah bekal untuk melaksanakan konsep baru tersebut. Dalam menerapkan *Blue Economy*, harus tercipta sumber daya manusia yang tergali potensinya agar siap dan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan untuk menjalankan konsep itu secara maksimal.

Model sosialisasi yang diharapkan yaitu baik berupa pemaparan konsep *Blue*

*Economy* maupun penerapan secara nyata di lapangan, sehingga nantinya dapat diikuti oleh masyarakat pembudidaya disekitar kawasan pengembangan teknologi yang layak dan prospektif untuk dikembangkan masih sangat kurang dikenal oleh masyarakat (pembudidaya), terutama teknologi (metode budidaya, komoditas unggulan pengembangan, dan penanganan penyakit) untuk mendukung penerapan *Blue Economy*. Penerapan *Blue Economy* di bidang kelautan dan perikanan masih harus diperkaya dengan kebijakan kelautan dan perikanan termasuk didalamnya ketersediaan teknologi yang prospektif, peningkatan sumber daya manusia, dan sosialisasi konsep *Blue Economy*. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan konsep *Blue Economy* semestinya di arahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara seimbang melalui diversifikasi kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan jumlah dan keragaman produk, namun tetap menjamin perlindungan lingkungan dari kerusakan. Dengan memperhatikan strategi pengembangan yang ada tersebut, diharapkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan bisa berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dapat membawa Indonesia menjadi poros maritim dunia.

### **Perkembangan Konsep Blue Economy di Kabupaten Langkat dan Tapanuli Tengah**

*Blue economy* merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Konsep *blue economy* mengedepankan dan menitikberatkan pada efisiensi (Ilma, 2014). Efisiensi mendorong adanya pengembangan investasi dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari. Inti utama dari *blue economy* ini adalah kegiatan yang pro ekosistem. Segala limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari tanah maupun perairan umum. Limbah, baik limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada habitat dan kehidupan ekosistem.

### **Terdapat pengaruh positif Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara**

IKS (X1) memiliki nilai signifikan sebesar  $0.000 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $1343.638 > 2,30600$ , artinya IKS secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. UU No. 11 th 2009 pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara terencana, sistematis dan terarah, dilaksanakan untuk menterjemahkan visi dan misi pembangunan nasional ke dalam kebijakan dan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Setiawan, 2019).

Empat indikator ketahanan sosial masyarakat tersebut tercermin dalam salah satu komponen penyusun dimensi Indeks Ketahanan Sosial, yaitu modal sosial dalam perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Konsepsinya bahwa modal sosial merupakan sumber bagi bekerjanya sebuah sistem sosial yang akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan sosial masyarakat. (Setiawan, 2019)

menyatakan bahwa Indeks ketahanan SoSial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat

### **Terdapat pengaruh positif Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara**

IKE (X2) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $1848.522 > 2,30600$ , artinya IKE secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 (BPS,2022) Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan (Bustamam, 2021) yang menyatakan bahwa indeks ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

### **Terdapat pengaruh positif Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara.**

IKL (X3) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $1907.416 > 2,30600$ , artinya IKL secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. pemanfaatan dana desa dalam menciptakan ketahanan lingkungan adalah program penghijauan, pengelolaan sampah, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya air. Program program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Selain pengelolaan lingkungan, upaya masyarakat untuk dapat meningkatkan ketahanan lingkungan juga akan berdampak pada mitigasi resiko bencana alam yang ada di desa. Dengan dukungan lingkungan yang sehat dan aman, maka masyarakat desa dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hariwibowo, 2023).

### **Pengaruh Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di wilayah pesisir Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara**

Hasil penelitian menyatakan bahwa IKS, IKE dan IKL berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil satatistik yaitu  $F_{tabel} = 3,01$  dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $120.61702$ . Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $120.61702 > 3,01$  maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa IKS, IKE dan IKL berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah meluncurkan program Dana Desa sejak tahun 2015. Program ini bertujuan untuk memberikan dana langsung kepada desa-desa di seluruh Indonesia untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, yang sekaligus sebagai upaya nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat diukur melalui peningkatan pencapaian IDM (Indeks Desa Membangun). Angka IDM yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kondisi desa yang semakin baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil dari pencapaian IDM ini adalah kategori desa yang terdiri dari sangat

tertinggal, tertinggal, maju, dan mandiri. Dengan demikian pencapaian IDM desa akan menunjukkan kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang, atau pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals atau pengembangan berkelanjutan) (Rima,2022)

Indeks Kesejahteraan Sosial adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran kesejahteraan sosial suatu negara.. Berbagai pengukuran indeks terkait kesejahteraan telah dilakukan antara lain tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan koefisien gini, serta indeks pembangunan manusia. Selain itu BPS juga setiap tahun mengeluarkan publikasi tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat. Publikasi ini menyajikan delapan bidang yang mencakup, pendidikan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup (BPS, 2015).

Peningkatan IDM harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan desa yang berkelanjutan yang lekat dengan nilai, budaya dan karakteristik desa. IDM memandang penting prakarsa dan kuatnya masyarakat desa dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan desa sehingga ketersediaan data dan pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Sanapiah & Nugroho, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan proses untuk membuat masyarakat berdaya memperbaiki kehidupan mereka. Dorongan dan gagasan awal dalam memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menginisiasi, mendukung, dan merencanakan secara bersama kegiatan apa yang dapat dijadikan peluang selain pengembangan sumber daya manusia yang menjadi sasaran utama kegiatan tersebut. Perubahan yang disebabkan oleh pembangunan industri dalam satu kawasan tertentu memberikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, apakah mereka sebagai aktor pembangunan atau hanya sebagai penonton perubahan tersebut yang meliputi perubahan mata pencaharian hidup, kesempatan pencarian pekerjaan baru, dan perubahan tingkat penghasilan. Jika masyarakat lokal siap terhadap perubahan tersebut maka mereka akan diuntungkan baik langsung dan tidak langsung dari kondisi sebelumnya. Jika tidak, maka potensi gesekan antarmasyarakat dapat memicu kecemburuan sosial yang akan membawa kepada konflik sosial antarmasyarakat lokal dan pendatang.

## KESIMPULAN

Kebijakan penggunaan dana desa saat ini mengacu pada peraturan Kementerian Desa yang disesuaikan dengan tujuan pembangunan Nasional.. pandemi COVID-19 memiliki dampak pada perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Dimana, pada tahun 2023 saat ini prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi penanganan bencana alam dan non-alam dalam mendukung pencapaian SDG's Desa. Saat ini belum terdapat program khusus yang menggunakan dana desa untuk pengembangan wilayah pesisir maupun program khusus *Blue Economy* di kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Langkat. Secara parsial variabel Indeks Ketahanan Sosial (IKS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat, variabel Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat, variabel Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat. Yang artinya jika variabel IKS, IKE, IKL meningkat, maka Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa tersebut juga ikut meningkat. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan

Indeks Ketahanan Lingkungan secara simultan (bersama-sama) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

#### REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Desa, 2015. <https://www.bps.go.id>
- Baltagi, B. H. 2005. *Econometrics Analysis of Data Panel*. Third Edition. John Wiley & Sons Ltd., Chicester.
- Bustamam, N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 21(1).
- Daulay, SR. (2022). *Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy Dalam Mewujudkan SDGs Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)*.
- Hariwibowo, I. N. (2023). Peran Dana Desa Dalam Peningkatan Ketahanan Lingkungan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding SENAPAS*, 1(1)
- Iftitah and P. Wibowo, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, vol. 48, no. 1, pp. 17–36, Jun. 2022, doi: 10.33701/jipwp.v48i1.2331.
- Ilma, A. F. N. (2014). *Blue Economy: Keseimbangan Perspektif Ekonomi Dan Lingkungan*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Rima, Hasiyah, and Azmi,(2022) "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 31, no. 2, pp. 99–109,
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. Paradigm Publications, Taos, New Mexico.
- Purwoko, A. (2005). *Dampak Kerusakan Ekosistem Hutam Bakau (Mangrove) Terhadap Pendapatan Masyarakat Pantai Di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat*.
- Rahma, & Rifkah. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*.
- Restu, R., & Damanik, M. R. S. (2012). Kajian Perubahan Tutupan Mangrove Menggunakan Citra Landsat TM Di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Geografi*, 4(2), 69–78.
- Sanapiah, A. A., & Nugroho, S. (2019). Implementasi Indeks Desa Membangun Dalam Mendorong Perkembangan Dan Kemandirian Desa Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 1(1), 50–60.
- Setiawan, H. H. (2019). Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Di Indonesia. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(3).
- Todaro. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas)*. Jakarta : Erlangga.